



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 35**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 35 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2023**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 161 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
13. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
15. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
16. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
27. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
31. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
32. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya dalam Rekening Kas Umum Daerah atau rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
34. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
35. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

39. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
40. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
41. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
42. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
43. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
44. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
45. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
46. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

47. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
48. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
49. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
50. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
51. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
52. Penghapustagihan piutang adalah penghapusan piutang berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
53. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
54. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

55. Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD
56. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
57. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
58. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
59. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
60. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
61. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
62. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
63. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
64. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

65. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
66. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
67. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
68. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
69. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
70. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
71. Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
72. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
73. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

74. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan
75. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
76. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
77. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
78. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
79. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
80. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

81. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
82. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
83. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
84. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
85. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
86. Pendapatan Transfer-LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
87. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan / atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

88. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
89. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
90. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
91. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
92. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
93. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
94. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

95. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
96. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

## BAB II SISTEM AKUNTANSI

### Pasal 2

- (1) SAPD meliputi :

BAB I	Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Dumai
BAB II	Sistem Akuntansi Pendapatan
BAB III	Sistem Akuntansi Belanja dan Beban
BAB IV	Sistem Akuntansi Pembiayaan
BAB V	Sistem Akuntansi Aset Lancar
BAB VI	Sistem Akuntansi Investasi
BAB VII	Sistem Akuntansi Aset Tetap
BAB VIII	Sistem Akuntansi Aset Lainnya
BAB IX	Sistem Akuntansi Penyusutan dan Amortisasi
BAB X	Sistem Akuntansi Perjanjian Jasa Konsesi
BAB XI	Sistem Akuntansi Properti Investasi
BAB XII	Sistem Akuntansi Kewajiban
BAB XIII	Sistem Akuntansi Ekuitas
BAB XIV	Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan
BAB XV	Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian

- (2) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 28 Desember 2023  
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

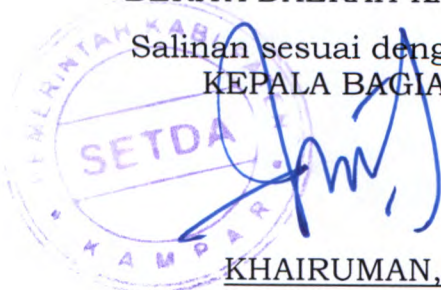
Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 28 Desember 2023  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH  
Pembina Tk. I  
Nip. 19671021 200012 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 35 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

BAB I  
GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah berdasarkan salah satunya pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Prinsip-prinsip akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar dijadikan sebagai pedoman dalam proses akuntansi yang dimuat dalam SAPD.

Selanjutnya, dalam penyusunan SAPD, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam proses pencatatan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENYUSUNAN SAPD

Penyusunan SAPD dilakukan berdasarkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi, proses bisnis pada satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah.
2. Identifikasi terhadap prosedur yang terkait dengan transaksi yang dilakukan.
3. Menentukan pihak pelaksana terkait.

4. Menentukan dan identifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal untuk kemudian dilakukan proses akuntansi.
5. Menentukan standar jurnal.
6. Menyusun langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan sistem akuntansi.

Ruang Lingkup SAPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar meliputi:

- BAB I Gambaran Umum
- BAB II Sistem Akuntansi Pendapatan
  - A. Sistem Akuntansi Pendapatan Pajak
  - B. Sistem Akuntansi Pendapatan Retribusi
  - C. Sistem Akuntansi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - D. Sistem Akuntansi Lain-lain PAD yang sah
  - E. Sistem Akuntansi Pendapatan Transfer
  - F. Sistem Akuntansi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- BAB III Sistem Akuntansi Belanja dan Beban
  - A. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Pegawai
  - B. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Barang dan Jasa
  - C. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Subsidi
  - D. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Hibah
  - E. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Bantuan Sosial
  - F. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Bunga
  - G. Sistem Akuntansi Belanja Modal
  - H. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Tidak Terduga
  - I. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Transfer
- BAB IV Sistem Akuntansi Pembiayaan
  - A. Sistem Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
  - B. Sistem Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
- BAB V Sistem Akuntansi Aset Lancar
  - A. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas
  - B. Sistem Akuntansi Piutang dan Penyisihan Piutang
  - C. Sistem Akuntansi Persediaan
  - D. Sistem Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
- BAB VI Sistem Akuntansi Investasi
  - A. Sistem Akuntansi Investasi Non Permanen
  - B. Sistem Akuntansi Permanen
- BAB VII Sistem Akuntansi Aset Tetap
  - A. Sistem Akuntansi Pengadaan Aset Tetap
  - B. Sistem Akuntansi Penggunaan Aset Tetap
  - C. Sistem Akuntansi Pemanfaatan Aset Tetap
  - D. Sistem Akuntansi Pemeliharaan Aset Tetap
  - E. Sistem Akuntansi Penilaian Aset Tetap
  - F. Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap
  - G. Sistem Akuntansi Penghapusan Aset Tetap
- BAB VIII Sistem Akuntansi Aset Lainnya
  - A. Sistem Akuntansi Tagihan Jangka Panjang
  - B. Sistem Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga
  - C. Sistem Akuntansi Aset Tidak Berwujud

- D. Sistem Akuntansi Aset Lain-lain
- E. Sistem Akuntansi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- BAB IX Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud
- BAB X Sistem Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa
- BAB XI Sistem Akuntansi Properti Investasi
- BAB XII Sistem Akuntansi Kewajiban
  - A. Sistem Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek
  - B. Sistem Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang
- BAB XIII Sistem Akuntansi Ekuitas
- BAB XIV Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan
- BAB XV Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian

Masing-masing sistem akuntansi tersebut dijelaskan dalam bab-bab berikut.

## BAB II SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

### A. Umum

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pendapatan Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait dengan pemungutan dan pencatatan Pendapatan Daerah meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
  - f. PPKD selaku BUD
2. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi dari Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;atas setiap transaksi pendapatan dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah.

### B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah
  - a. Dokumen yang digunakan:
    - 1) Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah
    - 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah
    - 3) Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak Daerah
    - 4) Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Daerah
    - 5) Surat Ketetapan Denda Pajak Daerah
    - 6) Register Surat Ketetapan Pajak Daerah
    - 7) Tanda Bukti Pembayaran
    - 8) Surat Tanda Setoran
    - 9) Register Surat Tanda Setoran
    - 10) Nota Kredit Bank
    - 11) Buku Kas Umum
    - 12) Buku Pembantu Penerimaan
    - 13) Buku Pembantu Piutang
    - 14) Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan
    - 15) Dokumen lain yang dipersamakan
  - b. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Kas di Bendahara Penerimaan melalui Penetapan (*Official Assessment*)
    - 1) Pencatatan pada SKPD
      - a) Saat Penetapan

Pencatatan menggunakan dasar dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Daerah.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.03.xx.x x.xxxx	Piutang Pajak Daerah	xxx	
				7.1.01.xx.x x.xxxx	Pajak Daerah-LO		xxx

- b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Pencatatan menggunakan dasar dokumen Tanda Bukti Pembayaran/Surat Tanda Setoran/Nota Kredit Bank

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.02. 01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
4.1.01.xx.x x.xxxx	Pajak Daerah		xxx	1.1.03.xx.x x.xxxx	Piutang Pajak Daerah		xxx

- c) Saat penyeteroran ke Kas Daerah  
Pencatatan menggunakan dasar dokumen Surat Tanda Setoran.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.02. 01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

- 2) Pencatatan pada SKPKD  
a) Saat penetapan  
Tidak ada pencatatan  
b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Tidak ada pencatatan  
c) Saat penyeteroran ke Kas Daerah  
Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

- c. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Kas di Kas Daerah melalui Penetapan (*Official Assessment*)

- 1) Pencatatan pada SKPD  
a) Saat Penetapan  
Pencatatan menggunakan dasar dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Daerah.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.03.xx.x x.xxxx	Piutang Pajak Daerah	xxx	
				7.1.01.xx.x x.xxxx	Pajak Daerah-LO		xxx

- b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Pencatatan menggunakan dasar dokumen Tanda Bukti  
Pembayaran/Surat Tanda Setoran/Nota Kredit Bank

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
4.1.01.xx.x x.xxxx	Pajak Daerah		xxx	1.1.03.xx.x x.xxxx	Piutang Pajak Daerah		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD

- a) Saat penetapan

Tidak ada pencatatan

- b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

- d. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Kas di Bendahara Penerimaan tanpa melalui Penetapan (*Self Assessment*)

1) Pencatatan pada SKPD

- a) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Pencatatan menggunakan dasar dokumen Tanda Bukti  
Pembayaran/Surat Tanda Setoran/Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
4.1.01.xx.x x.xxxx	Pajak Daerah		xxx	7.1.01.xx.x x.xxxx	Pajak Daerah-LO		xxx

- b) Saat penyeteroran ke Kas Daerah

Pencatatan menggunakan dasar dokumen Surat Tanda Setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD

- a) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Tidak ada pencatatan

- b) Saat penyeteroran ke Kas Daerah

Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

e. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Kas di Kas Daerah tanpa melalui Penetapan (*Self Assessment*)

1) Pencatatan pada SKPD

Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Pencatatan menggunakan dasar dokumen Tanda Bukti Pembayaran/Surat Tanda Setoran/Nota Kredit Bank

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
4.1.01.xx.xxxx	Pajak Daerah		xxx	7.1.01.xx.xxxx	Pajak Daerah-LO		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD

Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

## 2. Retribusi Daerah

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- 3) Register Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- 4) Tanda Bukti Pembayaran
- 5) Surat Tanda Setoran
- 6) Register Surat Tanda Setoran
- 7) Nota Kredit Bank
- 8) Buku Kas Umum
- 9) Buku Pembantu Penerimaan
- 10) Buku Pembantu Piutang
- 11) Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan
- 12) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah pada Kas di Bendahara Penerimaan melalui Penetapan (*Official Assessment*)

1) Pencatatan pada SKPD

a) Saat Penetapan

Pencatatan menggunakan dasar dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Kurang Bayar Retribusi Daerah.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.04.xx.xxxx	Piutang Retribusi Daerah	xxx	
				7.1.02.xx.xxxx	Retribusi Daerah-LO		xxx

- b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Pencatatan menggunakan dasar dokumen Tanda Bukti  
Pembayaran/Surat Tanda Setoran/Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
4.1.02.xx.x x.xxxx	Retribusi Daerah		xxx	1.1.04.xx.x x.xxxx	Piutang Retribusi Daerah		xxx

- c) Saat penyeteroran ke Kas Daerah  
Pencatatan menggunakan dasar dokumen Surat Tanda Setoran.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD

- a) Saat penetapan  
Tidak ada pencatatan
- b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Tidak ada pencatatan
- c) Saat penyeteroran ke Kas Daerah  
Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

- c. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah pada Kas di Kas Daerah melalui Penetapan (Official Assessment)

1) Pencatatan pada SKPD

- a) Saat Penetapan  
Pencatatan menggunakan dasar dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Kurang Bayar Retribusi Daerah.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.04.xx.x x.xxxx	Piutang Retribusi Daerah	xxx	
				7.1.02.xx.x x.xxxx	Retribusi Daerah-LO		xxx

- b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Pencatatan menggunakan dasar dokumen Tanda Bukti  
Pembayaran/Surat Tanda Setoran/Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
4.1.02.xx.x x.xxxx	Retribusi Daerah		xxx	1.1.04.xx.x x.xxxx	Piutang Retribusi Daerah		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD

a) Saat penetapan

Tidak ada pencatatan

b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

d. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah pada Kas di Bendahara Penerimaan tanpa melalui Penetapan (Self Assessment)

1) Pencatatan pada SKPD

a) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Pencatatan menggunakan dasar dokumen Tanda Bukti Pembayaran/Surat Tanda Setoran/Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
4.1.02.xx.x x.xxxx	Retribusi Daerah		xxx	7.1.02.xx.x x.xxxx	Retribusi Daerah-LO		xxx

b) Saat penyetoran ke Kas Daerah

Pencatatan menggunakan dasar dokumen Surat Tanda Setoran.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD

a) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Tidak ada pencatatan

b) Saat penyetoran ke Kas Daerah

Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

e. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah pada Kas di Kas Daerah tanpa melalui Penetapan (Self Assessment)

1) Pencatatan pada SKPD

Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Pencatatan menggunakan dasar dokumen Tanda Bukti Pembayaran/Surat Tanda Setoran/Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
4.1.02.xx.x x.xxxx	Retribusi Daerah		xxx	7.1.02.xx.x x.xxxx	Retribusi Daerah-LO		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD

Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan		1.1.01.01. 01.0001		Kas di Kas Daerah	xxx	
			1.1.13.01. 01.0001		RK SKPD		xxx

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Dokumen RUPS
- 2) Laporan Keuangan Perusahaan
- 3) Surat Tanda Setoran
- 4) Register Surat Tanda Setoran
- 5) Nota Kredit Bank
- 6) Buku Kas Umum
- 7) Buku Pembantu Penerimaan
- 8) Buku Pembantu Piutang
- 9) Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan
- 10) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Metode Ekuitas

- 1) Saat akhir periode pelaporan  
Pencatatan menggunakan dokumen laporan keuangan perusahaan.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan		1.2.02.01. xx.xxxx		Penyertaan Modal	xxx	
			7.1.03.xx.x x.xxxx		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		xxx

2) Saat Pengumuman Pembagian Deviden dalam RUPS

Pencatatan menggunakan dokumen RUPS.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan		1.1.05.xx.x x.xxxx		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
			1.2.02.01. xx.xxxx		Penyertaan Modal		xxx

3) Saat penerimaan deviden

Pencatatan menggunakan dokumen Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx	3.1.03.01. 01.0001		RK PPKD	xxx	
4.1.03.xx. xx.xxxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.1.05.xx.x x.xxxx		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx
			1.1.01.01. 01.0001		Kas di Kas Daerah	xxx	
			1.1.13.01. 01.0001		RK SKPD		xxx

- 4) Saat nilai deviden pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA sebelumnya lebih besar daripada nilai deviden yang diterima berdasarkan RUPS

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	xxx	
				1.2.02.01.xx.xxxx	Penyertaan Modal		xxx

- 5) Saat nilai deviden pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA sebelumnya lebih kecil daripada nilai deviden yang diterima berdasarkan RUPS

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.2.02.01.xx.xxxx	Penyertaan Modal	xxx	
				3.1.01.01.01.0001	Ekuitas		xxx

c. Metode Biaya

- 1) Saat Pengumuman Pembagian Deviden dalam RUPS Pencatatan menggunakan dokumen RUPS.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.05.xx.xxxx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
				7.1.03.xx.xxxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		xxx

- 2) Saat penerimaan deviden Pencatatan menggunakan dokumen Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
4.1.03.xx.xx.xxxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			1.1.05.xx.xxxx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Surat Ketetapan atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 2) Register Surat Ketetapan atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 3) Tanda Bukti Pembayaran
- 4) Surat Tanda Setoran
- 5) Register Surat Tanda Setoran
- 6) Nota Kredit Bank
- 7) Buku Kas Umum
- 8) Buku Pembantu Penerimaan

- 9) Buku Pembantu Piutang
- 10) Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan
- 11) Dokumen lain yang persamakan

- b. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Kas di Bendahara Penerimaan melalui Penetapan (Official Assessment)

1) Pencatatan pada SKPD

a) Saat Penetapan

Pencatatan menggunakan Surat Ketetapan atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.06.xx.x x.xxxx	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	
				7.1.04.xx.x x.xxxx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

- b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.02. 01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
4.1.04.xx.x x.xxxx	Lain-lain PAD yang Sah		xxx	1.1.06.xx.x x.xxxx	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		xxx

c) Saat penyeteroran ke Kas Daerah

Pencatatan menggunakan Surat Tanda Setoran.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.02. 01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD

a) Saat penetapan

Tidak ada pencatatan

b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Tidak ada pencatatan

c) Saat penyeteroran ke Kas Daerah

Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

- c. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Kas di Kas Daerah melalui Penetapan (Official Assessment).

1) Pencatatan pada SKPD

a) Saat Penetapan

Pencatatan menggunakan Surat Ketetapan atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.06.xx.x x.xxxx	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	
				7.1.04.xx.x x.xxxx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
4.1.04.xx.x x.xxxx	Lain-lain PAD yang Sah		xxx	1.1.06.xx.x x.xxxx	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD

a) Saat penetapan

Tidak ada pencatatan

b) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

d. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melalui Kas di Bendahara Penerimaan tanpa melalui Penetapan (Self Assessment)

1) Pencatatan pada SKPD

a) Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor

Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.02. 01.C001	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
4.1.04.xx.x x.xxxx	Lain-lain PAD yang Sah		xxx	7.1.04.xx.x x.xxxx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

b) Saat penyetoran ke Kas Daerah

Pencatatan menggunakan Surat Tanda Setoran.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.03.01. 01.C001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.02. 01.C001	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

- 2) Pencatatan pada SKPKD
- Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Tidak ada pencatatan
  - Saat penyeteroran ke Kas Daerah  
Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

- e. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melalui Kas di Bendahara Umum Daerah tanpa melalui Penetapan (Self Assessment)

- 1) Pencatatan pada SKPD  
Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
4.1.04.xx.x x.xxxx	Lain-lain PAD yang Sah		xxx	7.1.04.xx.x x.xxxx	Lain-lain PAD yang Sah-LO		xxx

- 2) Pencatatan pada SKPKD  
Saat terdapat Pembayaran dari Wajib Setor  
Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

### C. Pendapatan Transfer

- Dokumen yang digunakan
  - Nota Kredit Bank
  - Buku Kas Umum
  - Buku Pembantu Penerimaan
  - Buku Pembantu Piutang
  - Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan
  - SP2D
  - Surat Ketetapan
  - Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal  
Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
4.2.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Transfer		xxx	7.2.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Transfer-LO		xxx
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

D. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Dokumen yang digunakan
  - a. Nota Kredit Bank
  - b. Buku Kas Umum
  - c. Buku Pembantu Penerimaan
  - d. Buku Pembantu Piutang
  - e. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan
  - f. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

Pencatatan menggunakan Nota Kredit Bank.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
4.3.xx.xx.x x.xxxx	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			7.3.xx.xx.x x.xxxx	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO		xxx
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

E. Hal Khusus Lainnya

1. Dalam hal terdapat kurang bayar atas penerimaan pendapatan yang seharusnya diperoleh, dilakukan pencatatan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar dengan standar jurnal penerimaan pendapatan melalui penetapan.
2. Dalam hal terdapat lebih bayar atas penerimaan pendapatan:
  - a. Kelebihan penerimaan pendapatan pajak daerah sampai dengan Rp100.000,- diakui sebagai sumbangan pihak ketiga sesuai dengan sistem akuntansi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  - b. Kelebihan penerimaan pendapatan retribusi daerah yang sifatnya tidak berulang diakui sebagai sumbangan pihak ketiga sesuai dengan sistem akuntansi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  - c. Kelebihan penerimaan pendapatan selain huruf a dan b:
    - 1) Dilakukan pencatatan utang kelebihan pembayaran pendapatan berdasarkan surat ketetapan lebih bayar.
    - 2) Standar jurnal:
      - a) Terjadi di tahun berkenaan maupun tahun sebelumnya dalam hal laporan keuangan belum terbit dan pendapatan yang sifatnya berulang (pembebanan pada rekening pendapatan berkenaan)
        - (1) Saat terdapat Surat Ketetapan Lebih Bayar

Pencatatan berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			7.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Daerah-LO	xxx	
				2.1.07.xx.x x.xxxx	Utang Kelebihan Pembayaran .....		xxx

(2) Saat dikompensasikan ke pendapatan berikutnya

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredi:	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			2.1.07.xx.x x.xxxx	Utang Kelebihan Pembayaran .....	xxx	
				7.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Daerah-LO		xxx

(3) Dalam hal terdapat penambahan kas atas pendapatan berikutnya, dilakukan pencatatan jurnal atas penerimaan kas dimaksud dengan mengakumulasi pendapatan-LO

b) Terjadi di tahun berkenaan dan pendapatan yang sifatnya tidak berulang (pembebanan pada rekening pendapatan berkenaan)

(1) Saat terdapat Surat Ketetapan Lebih Bayar

Pencatatan berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredi:	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			7.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Daerah-LO	xxx	
				2.1.07.xx.x x.xxxx	Utang Kelebihan Pembayaran .....		xxx

(2) Saat dilakukan restitusi

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredi:	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
4.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Daerah	xxx		2.1.07.xx.x x.xxxx	Utang Kelebihan Pembayaran .....	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

c) Terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan pendapatan yang sifatnya tidak berulang (pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga)

(1) Saat terdapat Surat Ketetapan Lebih Bayar

Pencatatan berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredi:	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.4.01.01. 01.0001	Beban Tidak Terduga	xxx	
				2.1.07.xx.x x.xxxx	Utang Kelebihan Pembayaran .....		xxx

(2) Saat dilakukan Pembayaran melalui Belanja Tidak Terduga

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredi:	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.3.01.01. 01.0001	Belanja Tidak Terduga	xxx		2.1.07.xx.x x.xxxx	Utang Kelebihan Pembayaran .....	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

### 3. Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan

a. Pencatatan dan pengesahan pendapatan dilakukan untuk pendapatan yang diperoleh tanpa melalui pencatatan pada Kas di Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Dana BOS

##### 1) Dokumen yang digunakan

- a) Surat Pengesahan Pendapatan Transfer
- b) Dokumen lain yang dipersamakan

##### 2) Standar Jurnal

#### Pencatatan menggunakan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	xxx	
4.2.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Transfer		xxx	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				7.2 xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Transfer-LO		xxx

#### c. Dana BLUD

##### 1) Dokumen yang digunakan

- a) Surat Pengesahan Pendapatan
- b) Dokumen lain yang dipersamakan

##### 2) Standar Jurnal

#### Pencatatan menggunakan Surat Pengesahan Pendapatan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	xxx	
4.1.04.16. xx.xxxx	Pendapatan BLUD		xxx	7.1.04.16. xx.xxxx	Pendapatan dari BLUD-LO		xxx

#### d. Dana Kapitasi

##### 1) Dokumen yang digunakan

- a) Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi
- b) Dokumen lain yang dipersamakan

##### 2) Standar Jurnal

#### Pencatatan menggunakan Surat Pengesahan Pendapatan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		xxx	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				7.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO		xxx

e. Dana Desa

1) Dokumen yang digunakan

- a) Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Desa
- b) Nota Kredit Bank
- c) Dokumen lain yang dipersamakan

2) Standar Jurnal

Pencatatan menggunakan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		8.2.02.05. 02.0004	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kab/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa	xxx	
4.2.01.05. 01.0001	Dana Desa		xxx	7.2.01.05. 01.0001	Pendapatan Dana Desa-LO		xxx
5.4.02.05. 02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	xxx					
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx				

BAB III  
SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. Umum

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Belanja Daerah dan Beban memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK-Unit SKPD)
  - e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
  - f. Fungsi akuntansi SKPKD
  - g. PPKD selaku BUD
  
2. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan:
  1. analisis transaksi;
  2. pengukuran/penilaian; dan
  3. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;

atas setiap transaksi pendapatan dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah.

B. Belanja dan Beban Pegawai

1. Dokumen yang digunakan:
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - b. Nominatif perhitungan gaji dan tunjangan
  - c. Dokumen lain yang dipersamakan
  
2. Standar Jurnal
  - a. Pencatatan pada SKPD  
Pencatatan berdasarkan SP2D.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.01.xx .xx.xxxx	Belanja Pegawai	xxx		8.1.01.xx.x x.xxxx	Beban Pegawai	xxx	
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

- b. Pencatatan pada SKPKD  
Pencatatan berdasarkan SP2D.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

C. Belanja dan Beban Barang dan Jasa

1. Dokumen yang digunakan
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - b. Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
  - c. Nominatif perhitungan
  - d. Berita Acara Serah Terima (BAST)
  - e. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal
  - a. Pendekatan Beban

1) Saat serah terima terpisah dengan pengeluaran kas

a) Saat serah terima-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.02.xx.x x.xxxx	Beban Barang dan Jasa	xxx	
				2.1.06.02. xx.xxxx	Utang Belanja Barang dan Jasa		xxx

b) Saat pengeluaran kas untuk pembayaran

(1) Metode pembayaran GU/TU

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.02.xx.x x.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx		2.1.06.02. xx.xxxx	Utang Belanja Barang dan Jasa	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

(2) Metode pembayaran LS

(a) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.02.xx.x x.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx		2.1.06.02. xx.xxxx	Utang Belanja Barang dan Jasa	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(b) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

2) Saat serah terima bersamaan dengan pengeluaran kas

a) Metode pembayaran GU/TU

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.02.xx.x x.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx		8.1.02.xx.x x.xxxx	Beban Barang dan Jasa	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.02.xx.x x.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx		8.1.02.xx.x x.xxxx	Beban Barang dan Jasa	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

b. Pendekatan Aset

1) Saat serah terima terpisah dengan pengeluaran kas

a) Saat serah terima-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.12.xx.x x.xxxx	Persediaan ...	xxx	
				2.1.06.02. xx.xxxx	Utang Belanja Barang dan Jasa		xxx

b) Saat pengeluaran kas untuk pembayaran

(1) Metode pembayaran GU/TU

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.02.xx.x x.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx		2.1.06.02. xx.xxxx	Utang Belanja Barang dan Jasa	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

(2) Metode pembayaran LS

(a) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.02.xx.x x.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx		2.1.06.02. xx.xxxx	Utang Belanja Barang dan Jasa	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(b) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

2) Saat serah terima bersamaan dengan pengeluaran kas

a) Metode pembayaran GU/TU

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.02.xx.x x.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx		1.1.12.xx.x x.xxxx	Persediaan ....	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.02.xx.x x.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx		1.1.12.xx.x x.xxxx	Persediaan ....	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

D. Belanja dan Beban Bunga

1. Dokumen yang digunakan

- a. Surat Perintah Pencairan Dana
- b. Bukti memorial bank
- c. Bukti pengeluaran kas
- d. Perjanjian pinjaman
- e. Bukti memorial
- f. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

- a. Saat timbul kewajiban bunga/jatuh tempo

Pencatatan berdasarkan bukti memorial berdasarkan perjanjian pinjaman

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.03.xx.x x.xxxx	Beban Bunga	xxx	
				2.1.06.03. xx.xxxx	Utang Belanja Bunga		xxx

b. Saat pembayaran  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.03.xx.x x.xxxx	Belanja Bunga	xxx		2.1.06.03. xx.xxxx	Utang Belanja Bunga	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

E. Belanja dan Beban Subsidi

1. Dokumen yang digunakan

- a. Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai Pemberian Subsidi
- b. Perjanjian pemberian subsidi
- c. Surat Perintah Pencairan Dana
- d. Keputusan Bupati
- e. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

a. Dalam hal pengakuan kewajiban terpisah dengan pengeluaran kas

- 1) Saat timbul kewajiban-pencatatan pada SKPD berdasarkan Keputusan Bupati

Pencatatan berdasarkan penetapan pemberian subsidi.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.04.xx.x x.xxxx	Beban Subsidi ...	xxx	
				2.1.06.04. xx.xxxx	Utang Belanja Subsidi		xxx

- 2) Saat pengeluaran kas untuk pemberian subsidi

a) Metode pembayaran TU-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan TBP.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.04.xx.x x.xxxx	Belanja Subsidi	xxx		2.1.06.04. xx.xxxx	Utang Belanja Subsidi	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.04.xx.x x.xxxx	Belanja Subsidi	xxx		2.1.06.04. xx.xxxx	Utang Belanja Subsidi	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

b. Dalam hal tidak dilakukan pencatatan pengakuan kewajiban

1) Metode pembayaran TU-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.04.xx.x x.xxxx	Belanja Subsidi	xxx		8.1.04.xx.x x.xxxx	Beban Subsidi ...	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

2) Metode pembayaran LS

a) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.04.xx.x x.xxxx	Belanja Subsidi	xxx		8.1.04.xx.x x.xxxx	Beban Subsidi ...	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

b) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

F. Belanja dan Beban Hibah

1. Dokumen yang digunakan

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- Berita Acara Serah Terima
- Lampiran daftar penerima hibah Peraturan Daerah APBD
- Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

a. Hibah Uang

1) Saat timbul kewajiban (penandatanganan NPHD)-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan NPHD.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.05.xx.x x.xxxx	Beban Hibah ...	xxx	
				2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah		xxx

2) Saat pengeluaran kas

a) Metode pembayaran TU-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.05.xx.x x.xxxx	Belanja Hibah	xxx		2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.05.xx.x x.xxxx	Belanja Hibah	xxx		2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

3) Pengembalian sisa penggunaan dana hibah

Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana hibah, dilakukan pencatatan sesuai sistem akuntansi pendapatan. Pencatatan dimaksud pada akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek lain-lain pendapatan, rincian objek pendapatan atas pengembalian hibah, dan sub rincian objek berkenaan.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
4.3.03.01. 02.xxxx	Pendapatan atas Pengembalian Hibah		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				7.3.03.01. 02.xxxx	Pendapatan atas Pengembalian Hibah- LO		xxx

b. Hibah Barang

1) Barang yang tercatat dalam BMD

a) Saat tanggal NPHD dan BAST ditandatangani secara bersamaan  
Pencatatan berdasarkan NPHD.

(1) Dalam hal terdapat nilai akumulasi penyusutan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.05.xx.x x.xxxx	Beban Hibah ...	xxx	
				1.5.xx.xx.x x.xxxx	Akum penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		xxx

(2) Dalam hal tidak terdapat nilai akumulasi penyusutan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.05.xx.x x.xxxx	Beban Hibah ...	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		xxx

b) Saat tanggal NPHD dan BAST tidak ditandatangani secara bersamaan

(1) Saat penandatanganan NPHD

Pencatatan berdasarkan NPHD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.05.xx.x x.xxxx	Beban Hibah ...	xxx	
				2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah		xxx

(2) Saat penyerahan

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		xxx

2) Barang yang diperoleh dari pengadaan barang/jasa

a) Setelah penandatanganan NPHD, dilakukan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan belanja dan beban dengan metode aset. Saat barang diterima:

Pencatatan berdasarkan NPHD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.12.01.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ...	xxx	
				2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah		xxx

b) Saat pengeluaran kas untuk pengadaan barang/jasa

(1) Metode pembayaran GU/TU

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.05.xx .xx.xxxx	Belanja Hibah	xxx		2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah	xxx	
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

(2) Metode pembayaran LS

(a) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.05.xx .xx.xxxx	Belanja Hibah	xxx		2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah	xxx	
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(b) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan NPHD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

c) Saat penyerahan

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.05.xx.x x.xxxx	Beban Hibah ...	xxx	
				1.1.12.01.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ...		xxx

c. Hibah Jasa

Hibah jasa dapat berupa pemberian bantuan berupa jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Partai Politik sesuai dengan kriteria dan proses belanja hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Saat timbul kewajiban (penandatanganan NPHD)-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan NPHD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.05.xx.x x.xxxx	Beban Hibah ...	xxx	
				2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah		xxx

2) Saat pengeluaran kas

a) Metode pembayaran GU/TU-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.05.xx.x x.xxxx	Belanja Hibah	xxx		2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.05.xx.x x.xxxx	Belanja Hibah	xxx		2.1.06.05. xx.xxxx	Utang Belanja Hibah	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

G. Belanja dan Beban Bantuan Sosial

1. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini diatur untuk belanja dan beban bantuan sosial yang direncanakan. Untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sesuai dengan sistem akuntansi belanja tidak terduga.
2. Dokumen yang digunakan
  - a. Surat Keputusan tentang Bantuan Sosial
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana
  - c. Berita Acara Serah Terima
  - d. Dokumen lain yang dipersamakan
3. Standar Jurnal
  - a. Bantuan Sosial Uang

Saat pengeluaran kas dalam rangka penyerahan

1) Metode pembayaran GU/TU-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.06.xx.x x.xxxx	Belanja Bantuan Sosial	xxx		8.1.06.xx.x x.xxxx	Beban Bantuan Sosial	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

2) Metode pembayaran LS

a) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.06.xx.x x.xxxx	Belanja Bantuan Sosial	xxx		8.1.06.xx.x x.xxxx	Beban Bantuan Sosial	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

b) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

b. Bantuan Sosial Barang

1) Saat pengeluaran kas dan penyerahan dilakukan secara bersamaan

a) Metode pembayaran TU-pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan TBP dan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.06.xx.x x.xxxx	Belanja Bantuan Sosial	xxx		8.1.06.xx.x x.xxxx	Beban Bantuan Sosial	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D dan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.1.06.xx.x x.xxxx	Belanja Bantuan Sosial	xxx		8.1.06.xx.x x.xxxx	Beban Bantuan Sosial	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

2) Saat terdapat sisa barang

Pencatatan berdasarkan BAST dan Bukti Memorial.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.12.01. 02.0010	Persediaan dari Eelanja Bantuan Sosial	xxx	
				8.1.06.xx.x x.xxxx	Beban Bantuan Sosial		xxx

PA/KPA yang bertanggungjawab terhadap belanja bantuan sosial berupa barang dengan proses pengeluaran kas dan penyerahan belanja bantuan sosial yang dilakukan secara bersamaan, wajib melakukan pencatatan persediaan dalam hal terdapat sisa barang yang bersumber dari belanja bantuan sosial barang. Pencatatan persediaan dimaksud dilakukan dilakukan setiap terjadi transaksi.

#### H. Belanja Modal

1. Aset Tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan diperoleh. Mekanisme belanja modal dibagi menjadi:
  - a. Belanja modal tanpa menggunakan uang muka dan tidak berdasarkan termin.
  - b. Belanja modal tanpa menggunakan uang muka dan berdasarkan termin.
  - c. Belanja modal menggunakan uang muka dan tidak berdasarkan termin.
  - d. Belanja modal menggunakan uang muka dan berdasarkan termin.
2. Dokumen yang digunakan
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
  - c. Berita Acara Serah Terima
  - d. Dokumen lain yang dipersamakan
3. Standar jurnal
  - a. Belanja modal tanpa menggunakan uang muka dan tidak berdasarkan termin
    - 1) Metode pembayaran GU/TU
      - a) Dalam hal penyerahan aset dan pembayaran terpisah
        - (1) Saat penyerahan aset

##### Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap ...	xxx	
				2.1.06.xx.x x.xxxx	Utang Belanja Modal ...		xxx

##### (2) Saat pembayaran

##### Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		2.1.06.xx.x x.xxxx	Utang Belanja Modal ...	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

##### b) Dalam hal penyerahan aset dan pembayaran bersamaan

##### Pencatatan berdasarkan TBP dan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap ...	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

2) Metode pembayaran LS

a) Pencatatan pada SKPD

(1) Dalam hal penyerahan aset dan pembayaran terpisah

(a) Saat penyerahan aset

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap ...	xxx	
				2.1.06.xx.x x.xxxx	Utang Belanja Modal ...		xxx

(b) Saat pembayaran

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		2.1.06.xx.x x.xxxx	Utang Belanja Modal ...	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Dalam hal penyerahan aset dan pembayaran bersamaan

Pencatatan berdasarkan SP2D dan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap ...	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

b) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

b. Belanja modal tanpa menggunakan uang muka dan berdasarkan termin

1) Saat pemeriksaan fisik dan pembayaran termin hingga pelunasan

a) Metode pembayaran GU/TU

Pencatatan berdasarkan BAPF dan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.06. xx.xx.xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan BAPF dan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.06. xx.xx.xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

2) Pengakuan Aset Tetap  
Pencatatan berdasarkan BAPF dan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap ...	xxx	
				1.3.06. xx.xx.xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan		xxx

c. Belanja modal menggunakan uang muka dan tidak berdasarkan termin

1) Saat Pembayaran Uang Muka

a) Metode pembayaran GU/TU  
Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.1.09.05. 01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.1.09.05. 01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

2) Saat pelunasan

a) Metode pembayaran GU/TU

Pencatatan berdasarkan BAST dan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap ...	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.09.05. 01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		xxx
				1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan BAST dan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap ...	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.09.05. 01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

d. Belanja modal menggunakan uang muka dan berdasarkan termin

1) Saat Pembayaran Uang Muka

a) Metode pembayaran TU

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.1.09.05. 01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.1.09.05. 01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

2) Saat pemeriksaan fisik dan pembayaran termin pertama

a) Metode pembayaran TU

Pencatatan berdasarkan BAPF dan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.06. xx.xx.xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.09.05. 01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		xxx
				1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan BAPF dan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.06. xx.xx.xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.09.05. 01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

3) Saat pemeriksaan fisik dan pembayaran termin berikutnya hingga pelunasan

a) Metode pembayaran TU

Pencatatan berdasarkan BAPF dan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.06. xx.xx.xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

(1) Pencatatan pada SKPD

Pencatatan berdasarkan BAPF dan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.2.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Modal ...	xxx		1.3.06. xx.xx.xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx

## (2) Pencatatan pada SKPKD

## Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

## 4) Pengakuan Aset Tetap

## Pencatatan berdasarkan BAPF dan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap ...	xxx	
				1.3.06. xx.xx.xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan		xxx

## I. Belanja dan Beban Tidak Terduga

1. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Mekanisme belanja tidak terduga dibagi menjadi:

- a. Pembebanan langsung; dan
- b. Pergeseran anggaran

Sistem akuntansi belanja dan beban tidak terduga hanya mengatur terhadap mekanisme pembebanan langsung.

## 2. Dokumen yang digunakan

- a. Rencana Kebutuhan Belanja
- b. Surat Perintah Pencairan Dana
- c. Surat Keputusan
- d. Berita Acara Serah Terima
- e. Dokumen lain yang dipersamakan

## 3. Standar jurnal

a. Pembebanan langsung selain pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

## 1) Metode pembayaran TU

## Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	xxx		8.4.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga	xxx	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

## 2) Metode pembayaran LS

## Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	xxx		8.4.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga	xxx	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

b. Pembebanan langsung untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

1) Saat pengakuan utang kelebihan pembayaran

Pencatatan berdasarkan surat ketetapan atas pengembalian penerimaan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.4.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga	xxx	
				2.1.07.xx.x x.xxxx	Utang Kelebihan Pembayaran ....		xxx

2) Saat pembayaran

a) Metode pembayaran TU

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	xxx		2.1.07.xx.x x.xxxx	Utang Kelebihan Pembayaran ....	xxx	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Metode pembayaran LS

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	xxx		2.1.07.xx.x x.xxxx	Utang Kelebihan Pembayaran ....	xxx	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

#### J. Belanja dan Beban Transfer

1. Dokumen yang digunakan

- Peraturan Kepala Daerah mengenai Belanja Transfer
- Surat Keputusan
- Surat Perintah Pencairan Dana
- Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar jurnal

Pengakuan dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Belanja Transfer

a. Dalam hal terdapat penetapan kewajiban transfer

1) Pengakuan kewajiban atas transfer

Pencatatan berdasarkan surat keputusan/ketetapan belanja transfer

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.2.xx.xx.x x.xxxx	Beban Transfer ...	xxx	
				2.1.06.12. xx.xxxx/2. 1.06.13.xx .xxxx/	Utang Belanja Transfer ...		xxx

2) Saat pengeluaran kas  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.4.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Transfer ...	xxx		2.1.06.12. xx.xxxx/2. 1.06.13.xx .xxxx/	Utang Belanja Transfer ...	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

b. Dalam hal tidak terdapat penetapan kewajiban transfer  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.4.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Transfer ...	xxx		8.2.xx.xx.x x.xxxx	Beban Transfer ...	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

K. Hal Khusus Lainnya

1. Pencatatan dan Pengesahan Belanja

a. Pencatatan dan pengesahan belanja dilakukan untuk belanja yang dilakukan tanpa melalui pencatatan pada Kas di Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana BOS

1) Dokumen yang digunakan

- a) Surat Pengesahan Belanja
- b) Dokumen lain yang dipersamakan

2) Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.x.xx.xx.x x.8888	Belanja ... BOS	xxx		8.x.xx.xx.x x.8888	Beban ... BOS	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.05. 01.0001	Kas Dana BOS		xxx

c. Dana BLUD

1) Dokumen yang digunakan

- a) Surat Pengesahan Belanja
- b) Dokumen lain yang dipersamakan

2) Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.x.xx.xx.x x.9999	Belanja ... BLUD	xxx		8.x.xx.xx.x x.9999/1. x.xx.xx.xx. xxxx	Beban ... BLUD/Aset	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.04. 01.0001	Kas di BLUD		xxx

d. Dana Desa

1) Dokumen yang digunakan

- a) Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Desa
- b) Nota Kredit Bank
- c) Dokumen lain yang dipersamakan

2) Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		8.2.02.05. 02.0004	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kab/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa	xxx	
4.3.03.02. 01.0001	Pendapatan Dana Desa		xxx	7.2.01.05. 01.0001	Pendapatan Dana Desa-LO		xxx
	Belanja Dana Desa	xxx					
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx				

e. Dana Kapitasi

1) Dokumen yang digunakan

- a) Surat Pengesahan Belanja Dana Kapitasi
- b) Dokumen lain yang dipersamakan

2) Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.x.xx.xx.x x.xxxx	Belanja	xxx		8.x.xx.xx.x x.xxxx	Beban	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.06. 01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		xxx

**BAB IV**  
**SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

**A. Umum**

1. Sistem akuntansi pembiayaan terbagi menjadi sistem akuntansi penerimaan pembiayaan dan sistem akuntansi pengeluaran pembiayaan. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembiayaan Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. PPKD selaku BUD
  - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - c. Fungsi akuntansi SKPKD
  - d. BUMN
  - e. BUMD
  - f. LKB
  - g. LKBB
2. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi dari Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;
 atas setiap transaksi pembiayaan dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah.

**B. Penerimaan Pembiayaan**

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
  - a. Dokumen yang digunakan:
    - 1) Laporan Realisasi Anggaran sebelum tahun anggaran berjalan yang telah diaudit oleh BPK
    - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
    - 3) Dokumen lain yang dipersamakan
  - b. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sebelum tahun anggaran berjalan yang telah diaudit oleh BPK

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx			Tidak ada pencatatan	xxx	
6.1.01.xx .xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		xxx				xxx

2. Pencairan Dana Cadangan
  - a. Dokumen dan Catatan
    - 1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan

- 2) Surat permohonan pencairan dana cadangan oleh BUD
- 3) Surat Tanda Setoran atau Nota Kredit Penyetoran Dana Cadangan
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Nota Kredit.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
6.1.02.01 .01.0001	Pencairan Dana Cadangan		xxx	1.4.01.01. 01.0001	Dana Cadangan		xxx
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Nota Kredit.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
6.1.03.xx .xx.xxxx	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx	1.2.xx.xx.x x.xxxx	Investasi Jangka Panjang ...		xxx
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Peraturan Daerah tentang Penerbitan Obligasi Daerah
- 2) Perjanjian Pinjaman
- 3) Nota Kredit Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Nota Kredit.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
6.1.04.xx .xx.xxxx	Penerimaan Pinjaman Daerah		xxx	2.x.xx.xx.x x.xxxx	Kewajiban ...		xxx
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Nota Kredit Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
- 2) Surat Perjanjian
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Nota Kredit.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
6.1.05.xx .xx.xxxx	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		xxx	1.1.09.xx.x x.xxxx	Bagian Lancar Tagihan ....		xxx
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Nota Kredit Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan Nota Kredit.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
6.1.06.xx .xx.xxxx	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		xxx		rekening berkenaan		xxx
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

C. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
  - a. Dokumen yang digunakan
    - 1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan
    - 2) Surat Perintah Pencairan Dana
    - 3) Dokumen lain yang dipersamakan
  - b. Standar Jurnal  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	xxx		1.4.01.01.01.0001	Dana Cadangan	xxx	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

2. Penyertaan Modal Daerah
  - a. Dokumen yang digunakan
    - 1) Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
    - 2) Perjanjian penyertaan modal pemerintah daerah
    - 3) Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal Daerah
    - 4) Surat Perintah Pencairan Dana
    - 5) Dokumen lain yang dipersamakan
  - b. Standar Jurnal  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.2.02.xx.xx.xxxx	Penyertaan Modal Daerah	xxx		1.2.02.01.xx.xxxx	Penyertaan Modal	xxx	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
  - a. Sebelum melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang, dilakukan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke bagian lancar utang jangka panjang sesuai dengan dokumen perjanjian.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
				2.2.xx.xx.x.x.xxxx	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
				2.1.04.xx.x.x.xxxx	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx

- b. Dokumen yang digunakan
  - 1) Perjanjian pinjaman
  - 2) Surat Perintah Pencairan Dana
  - 3) Dokumen lain yang dipersamakan

c. Standar jurnal  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.2.03.xx. xx.xxxx	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	xxx		2.1.04.xx.x x.xxxx	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

4. Pemberian Pinjaman Daerah
- a. Dokumen yang digunakan
- 1) Perjanjian pemberian pinjaman
  - 2) Surat Perintah Pencairan Dana
  - 3) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.2.04.xx. xx.xxxx	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx		1.2.02.02. xx.xxxx	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- a. Dokumen yang digunakan
- 1) SP2D
  - 2) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.2.05.xx. xx.xxxx	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx			rekening berkenaan	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

D. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pelepasan investasi penyertaan modal dalam hal terdapat perbedaan nilai karena terdapat selisih keuntungan atau selisih kerugian berdasarkan hasil analisis investasi
  - a. Dalam hal terdapat selisih keuntungan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
6.1.03.xx .xx.xxxx	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx	1.2.xx.xx.x x.xxxx	Investasi Jangka Panjang ...		xxx
				7.4.01.03. xx.xxxx	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO		xxx
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

b. Dalam hal terdapat selisih kerugian

1) Masih terdapat nilai sisa investasi jangka panjang

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05 .01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		8.3.01.03. xx.xxxx	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	xxx	
6.1.03.xx .xx.xxxx	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.2.xx.xx.x x.xxxx	Investasi Jangka Panjang ...		xxx
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

2) Tidak terdapat nilai sisa investasi jangka panjang

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.3.01.03. xx.xxxx	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	xxx	
				1.2.xx.xx.x x.xxxx	Investasi Jangka Panjang ...		xxx

BAB V  
SISTEM AKUNTANSI ASET LANCAR

A. Umum

1. Sistem akuntansi aset lancar terbagi menjadi :
  - a. sistem akuntansi kas dan setara kas;
  - b. sistem akuntansi piutang dan penyisihan piutang
  - c. sistem akuntansi persediaan;
  - d. sistem akuntansi beban dibayar dimuka.
2. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Aset Lancar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. PPKD selaku BUD
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
3. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah.

B. Kas dan Setara Kas

1. Kas di Kas Daerah
  - a. Dokumen yang digunakan:
    - 1) Bukti transaksi penerimaan/pengeluaran kas
    - 2) Dokumen lain yang dipersamakan
  - b. Standar Jurnal
    - 1) Terhadap transaksi penerimaan kas pada rekening Kas di Kas Daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah memedomani sistem akuntansi pendapatan.
    - 2) Terhadap transaksi pengeluaran kas pada rekening Kas di Kas Daerah yang berhubungan dengan belanja daerah memedomani sistem akuntansi belanja dan beban.
    - 3) Terhadap transaksi penerimaan/pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembiayaan daerah memedomani sistem akuntansi pembiayaan.
    - 4) Penerimaan kas atas setoran bendahara penerimaan atau pengembalian sisa UP/TU  
Pencatatan berdasarkan nota kredit.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

- 5) Pengeluaran kas untuk transfer UP/GU/TU ke rekening bendahara penerimaan

Pencatatan berdasarkan surat tanda setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	

2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Dokumen yang digunakan:

- 1) Bukti transaksi penerimaan kas
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

- 1) Terhadap transaksi penerimaan kas pada rekening Kas di Bendahara Penerimaan yang berhubungan dengan pendapatan daerah memedomani sistem akuntansi pendapatan.
- 2) Pengeluaran kas untuk penysetoran pendapatan ke rekening kas di kas daerah

Pencatatan berdasarkan surat tanda setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Dokumen yang digunakan:

- 1) Bukti transaksi pengeluaran kas
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

- 1) Terhadap transaksi pengeluaran kas pada rekening Kas di Bendahara Pengeluaran yang berhubungan dengan belanja daerah memedomani sistem akuntansi belanja dan beban.
- 2) Penerimaan kas atas transfer UP/GU/TU dari BUD

Pencatatan berdasarkan nota kredit

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx

### 3) Penerimaan kas atas potongan PFK

Pencatatan berdasarkan TBP

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
				2.1.01.xx.x x.xxxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		xxx

### 4) Pengeluaran kas untuk pengembalian sisa UP/GU/TU

Pencatatan berdasarkan surat tanda setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

### 5) Pengeluaran kas untuk setoran PFK ke kas negara

Pencatatan berdasarkan surat tanda setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			2.1.01.xx.x x.xxxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

## 4. Kas di BLUD

### a. Dokumen yang digunakan:

- 1) Bukti transaksi penerimaan/pengeluaran kas
- 2) Surat Pengesahan Pendapatan
- 3) Surat Pengesahan Belanja
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

### b. Standar Jurnal

- 1) Pencatatan dan pengesahan pendapatan

Pencatatan berdasarkan surat pengesahan pendapatan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	xxx	
4.1.04.16.xx.xxxx	Pendapatan BLUD		xxx	7.1.04.16.xx.xxxx	Pendapatan dari BLUD-LO		xxx

- 2) Pencatatan dan pengesahan belanja

Pencatatan berdasarkan surat pengesahan belanja

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.x.xx.xx.x x.9999	Belanja ... BLUD	xxx		8.x.xx.xx.x x.9999/1. x.xx.xx.xx. xxxx	Beban ... BLUD/Aset	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.04. 01.0001	Kas di BLUD		xxx

## 5. Kas Dana BOS

### a. Dokumen yang digunakan:

- 1) Bukti transaksi penerimaan/pengeluaran kas
- 2) Surat Pengesahan Pendapatan
- 3) Surat Pengesahan Belanja
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

### b. Standar Jurnal

- 1) Pencatatan dan pengesahan pendapatan

Pencatatan berdasarkan surat pengesahan pendapatan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.05. 01.0001	Kas Dana BOS	xxx	
4.2.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Transfer		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				7.2.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Transfer-LO		xxx

- 2) Pencatatan dan Pengesahan Belanja

Pencatatan berdasarkan surat pengesahan belanja

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
5.x.xx.xx.x x.8888	Belanja ... BOS	xxx		8.x.xx.xx.x x.8888	Beban ... BOS	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.05. 01.0001	Kas Dana BOS		xxx

## 6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

### a. Dokumen yang digunakan:

- 1) Bukti transaksi penerimaan/pengeluaran kas
- 2) Surat Pengesahan Pendapatan
- 3) Surat Pengesahan Belanja
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

1) Pencatatan dan pengesahan pendapatan

Pencatatan berdasarkan surat pengesahan pendapatan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.05.01.0C01	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	
				3.1.03.01.01.0C01	RK PPKD		xxx

2) Pencatatan dan pengesahan belanja

Pencatatan berdasarkan surat pengesahan belanja

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.x.xx.xx.x x.xxxx	Belanja	xxx		8.x.xx.xx.x x.xxxx	Beban	xxx	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		xxx

7. Kas Lainnya

a. Dokumen yang digunakan:

- 1) Bukti transaksi penerimaan/pengeluaran kas
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

1) Penerimaan kas lainnya

Pencatatan berdasarkan nota kredit

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada per.catatan			1.1.01.07.01.0C01	Kas Lainnya	xxx	
				3.1.03.01.01.0C01	RK PPKD		xxx

2) Pengeluaran kas lainnya

Pencatatan berdasarkan surat tanda setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.13.01.01.0C01	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.07.01.0C01	Kas Lainnya		xxx

8. Setara Kas

a. Dokumen yang digunakan:

- 1) Bukti transaksi penerimaan/pengeluaran kas
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

1) Pembentukan setara kas

Pencatatan berdasarkan surat tanda setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.08.01.0001	Kas Lainnya	xxx	
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

2) Pengeluaran setara kas

Pencatatan berdasarkan surat tanda setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.1.01.08.01.0001	Kas Lainnya		xxx

9. Kas Dana Desa

a. Dokumen yang digunakan:

- 1) Bukti transaksi penerimaan/pengeluaran kas
- 2) Surat Pengesahan Pendapatan
- 3) Surat Pengesahan Belanja
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan surat pengesahan pendapatan dan belanja

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		8.2.02.05.02.0004	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kab/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa	xxx	
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa		xxx	7.2.01.05.01.0001	Pendapatan Dana Desa-LO		xxx
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	xxx					
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx				

C. Piutang dan Penyisihan Piutang

1. Dokumen yang digunakan

- a. Dokumen penetapan pendapatan
- b. Bukti memorial terhadap penyisihan piutang
- c. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

a. Piutang

Dalam hal terdapat hak atas penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen penetapan, dilakukan pencatatan piutang dengan memedomani standar jurnal penerimaan pendapatan melalui penetapan.

b. Penyisihan Piutang

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.07.xx.x x.xxxx	Beban Penyisihan Piutang	xxx	
				1.1.10.xx.x x.xxxx	Penyisihan Piutang		xxx

D. Persediaan

1. Dokumen yang digunakan

- a. Berita Acara Serah Terima
- b. Bukti Memorial
- c. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

a. Pengadaan persediaan

Terhadap jurnal belanja dalam rangka pengadaan persediaan memedomani standar jurnal belanja barang melalui pendekatan aset.

b. Penggunaan persediaan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			8.1.02.01. xx.xxxx	Beban Barang ...	xxx	
				1.1.12.xx.x x.xxxx	Persediaan ....		xxx

E. Beban Dibayar Di Muka

1. Dokumen yang digunakan

- a. Bukti pengakuan beban dibayar dimuka
- b. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

a. Pengakuan beban dibayar di muka di akhir periode

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.11.xx.x x.xxxx	Beban Dibayar Dimuka	xxx	
				8.x.xx.xx.x x.xxxx	Beban ...		xxx

b. Penyesuaian beban dibayar di muka

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.x.xx.xx.x x.xxxx	Beban ...	xxx	
				1.1.11.xx.x x.xxxx	Beban Dibayar Dimuka		xxx

F. Hal Khusus Lainnya

1. Penghapusbukan piutang

- a. Dokumen yang digunakan
- 1) Berita acara penghapusan piutang
  - 2) Surat keputusan pejabat yang berwenang
  - 3) Dokumen lain yang dipersamakan
- b. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan berita acara penghapusbukuan piutang

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			1.1.10.xx.x x.xxxx	Penyisihan Piutang	xxx	
				1.1.xx.xx.x x.xxxx	Piutang ...		xxx

BAB VI  
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG

A. Umum

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Investasi Jangka Panjang memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. PPKD selaku BUD
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
2. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah

B. Dokumen yang digunakan

1. Bukti transaksi penerimaan/pengeluaran kas
2. Dokumen lain yang dipersamakan

C. Standar Jurnal

1. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi  
Terhadap transaksi pengeluaran kas untuk investasi non permanen memedomani sistem akuntansi pengeluaran pembiayaan.
2. Penerimaan kas dalam rangka perolehan hasil investasi  
Terhadap transaksi pengeluaran kas untuk investasi non permanen memedomani sistem akuntansi pendapatan.
3. Pelepasan investasi  
Terhadap transaksi pelepasan investasi memedomani sistem akuntansi penerimaan pembiayaan.

BAB VII  
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A. Umum

1. Sistem akuntansi aset tetap terbagi menjadi :
  - a. Sistem akuntansi pengadaan aset tetap;
  - b. Sistem akuntansi penggunaan aset tetap;
  - c. Sistem akuntansi pemanfaatan aset tetap;
  - d. Sistem akuntansi pengamanan aset tetap;
  - e. Sistem akuntansi penilaian aset tetap;
  - f. Sistem akuntansi pemindahtanganan aset tetap;
  - g. Sistem akuntansi pemusnahan aset tetap; dan
  - h. Sistem akuntansi penghapusan aset tetap.
2. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Aset Tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  1. Pengguna Anggaran
  2. Kuasa Pengguna Anggaran
  3. PPKD selaku BUD
  4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  5. Fungsi akuntansi SKPKD
  6. Pengguna Barang
  7. Pengelola Barang
3. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah

B. Pengadaan Aset Tetap

1. Dokumen yang digunakan:
  - a. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa
  - b. Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c. Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
  - d. Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa
  - e. Berita Acara Serah Terima
  - f. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
  - g. Surat Perintah Pencairan Dana
  - h. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal  
Terhadap transaksi pengadaan aset tetap memedomani sistem akuntansi belanja modal.

C. Penggunaan Aset Tetap

1. Dokumen yang digunakan
  - a. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap
  - b. Berita Acara Serah Terima Aset Tetap dari Pembantu Pengelola BMD kepada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
  - c. Berita Acara Serah Terima Aset dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola BMD
  - d. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Penggunaan aset tetap berdasarkan penetapan status penggunaan, sehingga tidak dilakukan penjurnalan dalam penggunaannya.

D. Pemanfaatan Aset Tetap

1. Sewa
  - a. Dokumen yang digunakan
    - 1) Surat Permohonan Sewa Aset Tetap ditujukan kepada Pengguna Barang
    - 2) Dokumen Penelitian Aset Tetap yang akan disewakan
    - 3) Penilaian Aset Tetap yang akan disewakan
    - 4) Berita Acara Negosiasi Harga Sewa
    - 5) Surat Usulan/Ijin Pemanfaatan Aset Tetap
    - 6) Surat Persetujuan Pengelola BMD untuk pemanfaatan aset tetap dalam bentuk sewa
    - 7) Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa.
    - 8) Tanda Bukti Pembayaran Sewa
    - 9) Surat Tanda Setoran Pembayaran Sewa
    - 10) Surat Perjanjian Sewa yang ditandatangani kedua belah pihak
    - 11) Dokumen lain yang dipersamakan
  - b. Standar Jurnal
    - 1) Penyerahan BMD dari SKPD ke SKPKD
      - a) Pencatatan pada SKPD
 

Pencatatan berdasarkan keputusan sewa

        - (1) Reklasifikasi aset tetap dalam rangka penghentian penggunaan BMD

Pencatatan berdasarkan keputusan penghentian aset

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

(2) Penyerahan ke SKPKD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.03. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

b) Pencatatan pada SKPKD-saat penerimaan BMD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

2) Penyerahan kepada mitra pemanfaatan

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.02.01.01.0001	Sewa	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

3) Pencatatan penerimaan hasil kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa memedomani standar akuntansi pendapatan.

4) Saat penghentian sewa

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.06.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	xxx	
				1.5.02.01.01.0001	Sewa		xxx

5) Penetapan status penggunaan aset tetap setelah sewa berakhir

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

6) Penyusutan

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

a) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

b) Sewa

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.05.01.0001	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	xxx	
				1.5.06.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		xxx

2. Kerja Sama Pemanfaatan BMD

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Surat Permohonan pemanfaatan aset tetap pada Pengguna Barang dalam bentuk kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang.
- 2) Hasil Penelitian atas BMD yang diusulkan sebagai obyek KSP yang dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan BMD
- 3) Surat Persetujuan atas KSP
- 4) Proses Pemilihan Mitra KSP
- 5) Surat Penetapan Mitra KSP
- 6) Tanda Bukti Pembayaran Kontribusi Tetap Tahun Pertama
- 7) Surat Perjanjian KSP
- 8) Tanda Bukti Pembayaran Kontribusi Tetap periode selanjutnya
- 9) Tanda Bukti Pembayaran Pembagian Keuntungan Hasil KSP
- 10) Surat Tanda Setoran atau Nota Kredit Kontribusi Tetap
- 11) Surat Tanda Setoran atau Nota Kredit Pembagian Keuntungan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD
- 12) Dokumen lain yang dipersamakan.

b. Standar Jurnal

1) Penyerahan BMD dari SKPD ke SKPKD

Pencatatan berdasarkan keputusan kerja sama pemanfaatan

a) Pencatatan pada SKPD

- (1) Reklasifikasi aset tetap dalam rangka penghentian penggunaan BMD

Pencatatan berdasarkan keputusan penghentian penggunaan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

(2) Penyerahan ke SKPKD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.03.01.0C01	RK PPKD	xxx	
				1.5.04.01.01.0C02	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

b) Pencatatan pada SKPKD-saat penerimaan BMD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

2) Penyerahan kepada mitra pemanfaatan

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.02.01.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

3) Pencatatan penerimaan hasil kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerja sama pemanfaatan memedomani standar akuntansi pendapatan.

4) Saat penghentian kerja sama pemanfaatan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.06.01.01.0002	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	xxx	
				1.5.02.01.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan		xxx

5) Penetapan status penggunaan aset tetap

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

6) Penyusutan

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

a) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

b) Kerjasama Pemanfaatan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.05.01.0002	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		xxx

3. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Dokumen Penelitian BMD yang menjadi obyek BGS/BSG
- 2) Pembentukan Tim dan Penilaian BMD yang menjadi obyek BGS/BSG
- 3) Pemilihan Mitra BGS/BSG
- 4) SK Wali Bupati penetapan Mitra BGS/BSG dan besaran kontribusi tahunan dan persentase hasil BGS/BSG
- 5) Tanda Bukti Pembayaran Kontribusi Tetap Tahun Pertama
- 6) Surat Perjanjian BGS/BSG
- 7) Berita Acara Serah Terima Aset Tanah dari Pengguna Barang kepada Wali Bupati.
- 8) Tanda Bukti Pembayaran Kontribusi Tetap periode selanjutnya
- 9) Surat Tanda Setoran atau Nota Kredit Kontribusi Tetap
- 10) Berita Acara Serah Terima Aset BGS/BSG dari Mitra Bangun Guna Serah kepada Gubernur (Waktu BAST berbeda antara BGS dan BSG)
- 11) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

1) Bangun Serah Guna

Pencatatan berdasarkan keputusan bangun serah guna

a) Penyerahan BMD dari SKPD ke SKPKD

(1) Pencatatan pada SKPD

(a) Reklasifikasi aset tetap dalam rangka penghentian penggunaan BMD

Pencatatan berdasarkan keputusan penghentian penggunaan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

(b) Penyerahan ke SKPKD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD-saat penerimaan BMD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

b) Penyerahan kepada mitra bangun serah guna

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.02.01.01.0003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	xxx	
				1.5.06.xx.x.x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

c) Saat mitra bangun serah guna menyerahkan aset yang telah dibangun

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.02.01.01.0003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	xxx	
				2.x.xx.xx.x.x.xxxx	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga		xxx

d) Pembayaran utang kemitraan dengan pihak ketiga memedomani sistem akuntansi kewajiban

e) Pengakuan aset

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.02.01.01.0003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		xxx

f) Saat terdapat penetapan status penggunaan aset tetap

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

g) Penyusutan

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

(1) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

(2) Bangun Serah Guna

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.05. 01.0003	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	xxx	
				1.5.06.01. 01.0003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		xxx

2) Bangun Guna Serah

Pencatatan berdasarkan keputusan bangun guna serah

a) Penyerahan BMD dari SKPD ke SKPKD

(1) Pencatatan pada SKPD

(a) Reklasifikasi aset tetap dalam rangka penghentian penggunaan BMD

Pencatatan berdasarkan keputusan penghentian penggunaan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

(b) Penyerahan ke SKPKD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.03.01.0C01	RK PPKD	xxx	
				1.5.04.01.01.0C02	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

(2) Pencatatan pada SKPKD-saat penerimaan BMD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01.01.0C02	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.1.13.01.01.0C01	RK SKPD		xxx

b) Penyerahan kepada mitra bangun guna serah

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.02.01.01.0C03	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	xxx	
				1.5.05.xx.x.xxxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.04.01.01.0C02	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

c) Saat mitra bangun guna serah menyerahkan aset dalam hal nilai aset bertambah-pada saat berjalan

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.02.01.01.0C03	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	xxx	
				7.1.04.03.03.0C01	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO		xxx

d) Pengakuan aset saat mitra bangun guna serah menyerahkan aset dan dalam hal nilai aset bertambah-pada saat penyerahan/penghentian BGS

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01.01.0C02	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				7.1.04.03.03.0C01	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO		xxx
				1.5.02.01.01.0C03	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		xxx

e) Saat terdapat penetapan status penggunaan aset tetap

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

h) Penyusutan

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

(1) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

(2) Bangun Guna Serah

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.05. 01.0003	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	xxx	
				1.5.06.01. 01.0003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		xxx

4. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Dokumen Penelitian BMD yang menjadi obyek KSPI
- 2) Pembentukan Tim dan Penilaian BMD yang menjadi obyek KSPI
- 3) Pemilihan Mitra KSPI
- 4) SK Wali Bupati penetapan Mitra KSPI dan besaran kontribusi tahunan dan persentase hasil KSPI
- 5) Surat Perjanjian KSPI
- 6) Tanda Bukti Pembayaran Pembagian Kelebihan Keuntungan
- 7) Surat Tanda Setoran Pembayaran Pembagian Kelebihan Keuntungan
- 8) Berita Acara Serah Terima Aset berupa Infrastruktur dari Mitra KSPI kepada Bupati.
- 9) Dokumen lain yang dipersamakan.

b. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan keputusan kerja sama penyediaan infrastruktur

- 1) Penyerahan BMD dari SKPD ke SKPKD
  - a) Pencatatan pada SKPD

(1) Reklasifikasi aset tetap dalam rangka penghentian penggunaan BMD

Pencatatan berdasarkan keputusan penghentian penggunaan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

(2) Penyerahan ke SKPKD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.03. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

b) Pencatatan pada SKPKD-saat penerimaan BMD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

2) Penyerahan kepada mitra kerja sama penyediaan infrastruktur

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.02.01. 01.0004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

3) Pencatatan penerimaan hasil kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerja sama penyediaan infrastruktur memedomani standar akuntansi pendapatan.

4) Saat penyerahan kerja sama penyediaan infrastruktur

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.02.01. 01.0004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		xxx

5) Penetapan status penggunaan aset tetap

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				1.5.04.01. 01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

6) Penyusutan

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

a) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

b) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.05. 01.0004	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Penyediaan Infrastruktur		xxx

E. Pengamanan Aset Tetap

1. Pengamanan aset tetap meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
2. Dokumen yang digunakan
  - a. Bukti kepemilikan aset
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana
  - c. Dokumen lain yang dipersamakan
3. Standar Jurnal  
Terhadap pengeluaran kas terkait pengamanan aset tetap memedomani sistem akuntansi belanja dan beban.

F. Pemeliharaan Aset Tetap

1. Dokumen yang digunakan
  - a. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
  - b. laporan hasil pemeliharaan barang
  - c. kartu pemeliharaan barang
  - d. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal  
Terhadap pengeluaran kas terkait pemeliharaan aset tetap memedomani sistem akuntansi belanja dan beban.

G. Penilaian Aset Tetap

1. Dokumen yang digunakan
  - a. Berita Acara Hasil penilaian barang milik daerah
  - b. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan berita acara hasil penilaian barang milik daerah

a. Hasil penilaian lebih tinggi dari pada nilai aset

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				3.x.xx.xx.x x.xxxx	Ekuitas		xxx

b. Hasil penilaian lebih rendah dari pada nilai aset

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.x.xx.xx.x x.xxxx	Ekuitas	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

H. Pemindahtanganan Aset Tetap

1. Dokumen yang digunakan

- a. Surat usulan Penjualan/Tukar Menukar BMD.
- b. NPHD Hibah Aset.
- c. Berita Acara Hasil Penilaian
- d. Surat Persetujuan Bupati untuk Penjualan/Tukar Menukar BMD
- e. Berita Acara Hasil Lelang Penjualan
- f. Berita Acara Tukar Menukar BMD
- g. Tanda Bukti Pembayaran Penjualan BMD
- h. Surat Tanda Setoran Hasil Penjualan BMD
- i. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

a. Penyerahan BMD dari SKPD ke SKPKD

Pencatatan berdasarkan BAST

1) Pencatatan pada SKPD

- a) Reklasifikasi aset tetap dalam rangka penghentian penggunaan BMD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
				1.5.04.01. 01.xxxx	Aset Lain-Lain	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

b) Penyerahan ke SKPKD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.03. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.5.04.01. 01.xxxx	Aset Lain-Lain		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD-saat penerimaan BMD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01.01.xxxx	Aset Lain-Lain	xxx	
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		xxx

b. Pemindahtanganan

1) Penjualan

a) Dalam hal nilai jual diatas nilai buku

(1) Penyerahan aset

Pencatatan berdasarkan berita acara penjualan dan persetujuan penjualan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.06.01.08.xxxx	Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	xxx	
				7.4.01.01.08.xxxx	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO		xxx
				1.5.04.01.01.xxxx	Aset Lain-Lain		xxx

(2) Penerimaan kas atas penjualan aset

Dalam hal terdapat penerimaan pendapatan atas hak yang telah diakui, dilakukan pencatatan pendapatan atas penetapan dengan memedomani sistem akuntansi pendapatan.

b) Dalam hal nilai jual dibawah nilai buku

(1) Penyerahan aset

Pencatatan berdasarkan berita acara penjualan dan persetujuan penjualan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.06.01.08.xxxx	Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	xxx	
				8.3.01.01.08.xxxx	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	xxx	
				1.5.04.01.01.xxxx	Aset Lain-Lain		xxx

(2) Penerimaan kas atas penjualan aset

Dalam hal terdapat penerimaan pendapatan atas hak yang telah diakui, dilakukan pencatatan pendapatan atas penetapan dengan memedomani sistem akuntansi pendapatan.

2) Tukar Menukar

a) Dalam hal nilai tukar menukar diatas nilai buku

Pencatatan berdasarkan berita acara tukar menukar dan persetujuan tukar menukar

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				7.4.01.02.08.xxxx	Surplus Tukar Menukar Aset Lain-Lain-LO		xxx
				1.5.04.01.01.xxxx	Aset Lain-Lain		xxx

Penerimaan kas atas keuntungan selisih tukar menukar aset memedomani sistem akuntansi pendapatan.

b) Dalam hal nilai tukar menukar dibawah nilai buku

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				8.3.01.02. 08.xxxx	Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-LO	xxx	
				1.5.04.01. 01.xxxx	Aset Lain-Lain		xxx

3) Hibah

Hibah dalam bentuk pemberian BMD memedomani sistem akuntansi belanja dan beban.

I. Penghapusan Aset Tetap

1. Dokumen yang digunakan

- a. Surat Persetujuan Bupati
- b. Surat Keputusan Penghapusan Aset Tetap
- c. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

a. Penyerahan BMD dari SKPD ke SKPKD

1) Pencatatan pada SKPD

a) Reklasifikasi aset tetap dalam rangka penghentian penggunaan BMD

Pencatatan berdasarkan keputusan penghentian penggunaan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
				1.5.04.01. C1.xxxx	Aset Lain-Lain	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

b) Penyerahan ke SKPKD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.03. C1.0001	RK PPKD	xxx	
				1.5.04.01. C1.xxxx	Aset Lain-Lain		xxx

2) Pencatatan pada SKPKD-saat penerimaan BMD

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.04.01. C1.xxxx	Aset Lain-Lain	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

b. Penghapusan BMD

Pencatatan berdasarkan keputusan penghapusan BMD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.3.01.04. 08.xxxx	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	xxx	
				1.5.04.01. 01.xxxx	Aset Lain-Lain		xxx

## BAB VIII SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

### A. Umum

1. Sistem akuntansi aset lainnya terbagi menjadi :
  - a. Sistem akuntansi tagihan jangka panjang;
  - b. Sistem akuntansi kemitraan dengan pihak ketiga;
  - c. Sistem akuntansi aset tidak berwujud;
  - d. Sistem akuntansi aset lain-lain;
  - e. Sistem akuntansi akumulasi penyusutan aset lain-lain; dan
  - f. Sistem akuntansi perjanjian konsesi jasa.
2. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Aset Lainnya memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. PPKD selaku BUD
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
  - f. Pengelola Barang
  - g. Pengguna Barang
  - h. Pejabat Penatausahaan Barang
3. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah

### B. Tagihan Jangka Panjang

1. Dokumen yang digunakan:
  - a. Surat Keputusan Bupati tentang Pemindahtanganan BMD dengan cara penjualan
  - b. Berita Acara Penjualan Angsuran
  - c. Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
  - d. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
  - e. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
  - f. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal
  - a. Penjualan angsuran
    - 1) Dalam penjualan angsuran, terlebih dahulu dilakukan penghentian penggunaan aset sesuai sistem akuntansi aset tetap.
    - 2) Pencatatan tagihan penjualan angsuran saat penyerahan  
Pencatatan berdasarkan berita acara

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.01.01. xx.xxxx	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	
				1.5.04.01. 01.xxxx	Aset Lain-Lain		xxx

3) Reklasifikasi tagihan penjualan angsuran

Pencatatan berdasarkan bukti memorial berdasarkan keputusan penjualan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.09.03. xx.xxxx	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	
				1.5.01.01. xx.xxxx	Tagihan Penjualan Angsuran		xxx

4) Penerimaan kas atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran memedomani sistem akuntansi pendapatan.

b. Tuntutan Ganti Kerugian

1) Terhadap Bendahara

a) Pengakuan kekurangan kas

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.01.02. 01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	xxx	
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

b) Pada saat penandatanganan SKTJM/SKP2K

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.06.08. 01.0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	xxx	
				1.5.01.02. 01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		xxx

c) Reklasifikasi Piutang menjadi bagian lancar yang jatuh tempo

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.09.04. 01.0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	xxx	
				1.1.06.08. 01.0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		xxx

d) Penerimaan kas dalam rangka pembayaran bagian lancar yang jatuh tempo memedomani sistem akuntansi pendapatan.

2) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

a) Terlebih dahulu dilakukan penghentian penggunaan aset tetap dari SKPD ke SKPKD sesuai sistem akuntansi aset tetap.

b) Pengakuan kehilangan aset tetap

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.5.01.02. 02.C001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	xxx	
				1.5.04.01. 01.C002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		xxx

c) Pada saat penandatanganan SKTJM/SKP2K

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.05.08. 02.C001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	xxx	
				1.5.01.02. 02.C001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		xxx

d) Reklasifikasi Piutang menjadi bagian lancar yang jatuh tempo

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.09.04. 02.C001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	xxx	
				1.1.05.08. 02.C001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		xxx

e) Penerimaan kas dalam rangka pembayaran bagian lancar yang jatuh tempo memedomani sistem akuntansi pendapatan.

C. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Sistem akuntansi mengenai kemitraan dengan pihak ketiga memedomani sistem akuntansi aset tetap.

D. Aset Tidak Berwujud

1. Dokumen yang digunakan
  - a. Bukti perolehan goodwill
  - b. Sertifikat lisensi
  - c. Perjanjian franchise
  - d. Sertifikat Hak Cipta
  - e. Sertifikat paten
  - f. BAST Software
  - g. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar jurnal

Standar jurnal terhadap transaksi yang berkaitan dengan sistem akuntansi aset tidak berwujud memedomani sistem akuntansi aset tetap.

E. Aset Lain-Lain

1. Dokumen yang digunakan

- a. Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Aset Tetap
- b. Surat Keputusan tentang Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
- c. Surat Keputusan tentang penghapusan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat.
- d. Berita Acara Pemusnahan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat.
- e. Berita Acara Serah Terima Aset Tetap untuk Penjualan/Tukar Menukar/ Hibah/ Penyertaan Modal.
- f. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar jurnal

Standar jurnal terhadap transaksi yang berkaitan dengan sistem akuntansi aset lain-lain memedomani sistem akuntansi aset tetap.

F. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

1. Dokumen yang digunakan

- a. Bukti memorial penyusutan
- b. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		xxx

## BAB IX

### SISTEM AKUNTANSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

#### A. Umum

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. PPKD selaku BUD
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
  - f. Pengelola Barang
  - g. Pengguna Barang
  - h. Pejabat Penatausahaan Barang
2. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah.

#### B. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

1. Dokumen yang digunakan:
  - a. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah.
  - b. Laporan Penyusutan BMD
  - c. Bukti memorial yang memuat informasi nilai penyusutan yang harus dicatat.
  - d. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan	xxx	
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan		xxx

#### C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

1. Dokumen yang digunakan:
  - a. Laporan Aset Tidak Berwujud

- b. Bukti memorial yang memuat informasi nilai amortisasi yang harus dicatat.
- c. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.06. xx.xxxx	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	xxx	
				1.5.05.xx.x x.xxxx	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		xxx

**BAB X**  
**SISTEM AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA**

**A. Umum**

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terhadap Perjanjian Konsesi Jasa memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. PPKD selaku BUD
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
  - f. Pengelola Barang
  - g. Pengguna Barang
  - h. Pejabat Penatausahaan Barang
  - i. Mitra Perjanjian Konsesi Jasa
2. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;

atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah.

**B. Perjanjian Konsesi Jasa**

1. Dokumen yang digunakan
  - a. Naskah Perjanjian Konsesi Jasa
  - b. SP2D
  - c. BAST
  - d. Bukti Memorial
  - e. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal

a. Skema kewajiban keuangan

1) Perolehan Aset Konsesi Jasa  
Pencatatan berdasarkan BAST

a) Mitra membangun dan menyerahkan kepada pemerintah daerah

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Aset Konsesi Jasa	xxx	
				2.1.06.xx.x x.xxxx	Utang Belanja Modal		xxx

b) Pemerintah daerah melakukan reklasifikasi aset yang dimiliki

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Aset Konsesi Jasa	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

2) Pengakuan biaya perjanjian dan pelunasan utang belanja  
Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.x.xx.xx.x x.xxxx	Belanja	xxx		2.1.06.xx.x x.xxxx	Utang Belanja Modal	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	8.x.xx.xx.x x.xxxx	Beban ...	xxx	
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

3) Penyusutan Aset Konsesi Jasa  
Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		xxx

4) Penghentian Aset Konsesi Jasa  
Pencatatan menggunakan dokumen penghentian berdasarkan  
naskah perjanjian

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Aset Konsesi Jasa		xxx

b. Skema Pemberian hak usaha kepada mitra

1) Perolehan Aset Konsesi Jasa  
Pencatatan berdasarkan BAST

a) Mitra membangun dan menyerahkan kepada pemerintah daerah

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Aset Konsesi Jasa	xxx	
				2.1.05.xx.x x.xxxx	Pendapatan Diterima Dimuka		xxx

b) Pemerintah daerah melakukan reklasifikasi aset yang dimiliki

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Aset Konsesi Jasa	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

2) Pengakuan pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa  
Pencatatan berdasarkan ketetapan pendapatan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				2.1.05.xx.x x.xxxx	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	
				7.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan-LO		xxx

3) Penyusutan Aset Konsesi Jasa  
Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan	xxx	
				1.5.06.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		xxx

4) Penghentian Aset Konsesi Jasa  
Pencatatan menggunakan dokumen penghentian berdasarkan naskah perjanjian

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Aset Konsesi Jasa		xxx

**BAB XI**  
**SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI**

**A. Umum**

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terhadap Properti Investasi memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. PPKD selaku BUD
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
  - f. Pengelola Barang
  - g. Pengguna Barang
  - h. Pejabat Penatausahaan Barang
2. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;

atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah.

**B. Properti Investasi**

1. Dokumen yang digunakan
  - a. SP2D
  - b. BAST
  - c. Bukti Memorial
  - d. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal
  - a. Perolehan properti investasi
    - 1) Pembelian
      - a) Pembelian dengan skema kewajiban  
Pencatatan menggunakan SP2D dan/atau BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Properti Investasi	xxx	
				2.x.xx.xx.x x.xxxx	Utang Belanja		xxx

b) Pembelian dengan tunai

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
5.x.xx.xx.x x.xxxx	Belanja	xxx		1.x.xx.xx.x x.xxxx	Properti Investasi	xxx	
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.C001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.C001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.C001	Kas di Kas Daerah		xxx

2) Hibah

Pencatatan berdasarkan BAST

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.x.xx.xx.x x.xxxx	Properti Investasi	xxx	
4.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Hibah		xxx	7.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Hibah-LO		xxx
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Aset Konsesi Jasa		xxx

b. Pengakuan pendapatan sewa

Pendapatan sewa dicatat berdasarkan ketetapan penerimaan pendapatan dan/atau surat tanda setoran dengan memedomani sistem akuntansi pendapatan.

c. Penyusutan

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				8.1.08.xx.x x.xxxx	Beban Penyusutan	xxx	
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	

d. Revaluasi

1) Penambahan nilai

Pencatatan berdasarkan berita acara revaluasi

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Properti Investasi	xxx	
				3.x.xx.xx.x x.xxxx	Ekuitas		xxx

2) Penambahan nilai

Pencatatan berdasarkan berita acara revaluasi

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.x.xx.xx.x x.xxxx	Ekuitas	xxx	
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Properti Investasi		xxx

e. Alih Guna

1) Properti Investasi ke Aset Tetap

Pencatatan berdasarkan berita acara alih guna

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.3.xx.x x.xx.xxx x	Aset Tetap	xxx	
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxx	
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Properti Investasi		xxx
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

2) Properti Investasi ke Persediaan

Pencatatan berdasarkan berita acara alih guna

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.x.xx.x x.xx.xxx x	Persediaan	xxx	
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxx	
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Properti Investasi		xxx

3) Aset Tetap ke Properti Investasi

Pencatatan berdasarkan berita acara alih guna

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.x.xx.x x.xx.xxx x	Properti Investasi	xxx	
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
				1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx
				1.3.07.xx.x x.xxxx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		xxx

4) Persediaan ke Properti Investasi

Pencatatan berdasarkan berita acara alih guna

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.x.xx.x x.xx.xxx x	Properti Investasi	xxx	
				1.x.xx.xx.x x.xxxx	Persediaan		xxx

f. Pelepasan

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya. Sistem akuntansi pelepasan properti investasi memedomani sistem akuntansi aset tetap.

**BAB XII**  
**SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN**

**A. Umum**

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Kewajiban memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. PPKD selaku BUD
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
  - f. Bendahara Pengeluaran
  
2. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;
 atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah

**B. Kewajiban Jangka Pendek**

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
  - a. Dokumen yang digunakan
    - 1) Bukti pengeluaran kas
    - 2) Bukti pemungutan
    - 3) Surat Setoran Pajak
    - 4) Surat Setoran Bukan Pajak
    - 5) Dokumen lain yang dipersamakan
  - b. Standar Jurnal
    - 1) Saat pemungutan
      - a) Dalam hal pemungutan oleh SKPD (Belanja GU/TU)

Pencatatan berdasarkan bukti pemungutan/pemotongan PFK

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
				2.1.01.xx.x x.xxxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		xxx

b) Dalam hal pemungutan oleh SKPKD (Belanja LS)

Pencatatan berdasarkan bukti pemungutan/pemotongan PFK

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				2.1.01.xx.x x.xxxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		xxx

2) Saat penyetoran

a) Dalam hal penyetoran oleh SKPD (Belanja GU/TU)

Pencatatan berdasarkan surat tanda setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				2.1.01.xx.x x.xxxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	
				1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b) Dalam hal penyetoran oleh SKPKD (Belanja LS)

Pencatatan berdasarkan surat tanda setoran

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				2.1.01.xx.x x.xxxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

2. Utang Bunga

Sistem akuntansi utang bunga memedomani sistem akuntansi belanja dan beban bunga.

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

a) Dokumen yang digunakan

- 1) Surat perjanjian pinjaman
- 2) Nota Kredit
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

b) Standar Jurnal

- 1) Penerimaan pinjaman

Pencatatan berdasarkan nota kredit atas perjanjian pinjaman

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				2.1.03.xx. Xx.xxxx	Utang Pinjaman Jangka Pendek		xxx

2) Pembayaran pinjaman

Pencatatan berdasarkan SP2D

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				2.1.03.xx. Xx.xxxx	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Sistem akuntansi bagian lancar utang jangka panjang memedomani sistem akuntansi pembiayaan.

5. Pendapatan Diterima Dimuka

a. Dokumen yang digunakan

- 1) Surat Perjanjian Sewa
- 2) Bukti penetapan pendapatan
- 3) Surat Tanda Setoran
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan

b. Standar Jurnal

- 1) Saat penerimaan pendapatan  
Memedomani standar akuntansi pendapatan
- 2) Pada akhir periode

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				7.x.xx.xx.X x.xxxx	Pendapatan Daerah-LO	xxx	
				2.1.05.xx.x x.xxxx	Pendapatan Diterima Dimuka		xxx

3) Jurnal pembalik

Pencatatan berdasarkan bukti memorial

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				2.1.05.xx.x x.xxxx	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	
				7.x.xx.xx.X x.xxxx	Pendapatan Daerah-LO		xxx

6. Utang Belanja

Sistem akuntansi utang belanja memedomani sistem akuntansi belanja dan beban.

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Sistem akuntansi utang jangka pendek lainnya memedomani sistem akuntansi pendapatan.

C. Kewajiban Jangka Panjang

Sistem akuntansi kewajiban jangka panjang memedomani sistem akuntansi pembiayaan.

BAB XIII  
SISTEM AKUNTANSI EKUITAS

A. Umum

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Ekuitas memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. PPKD selaku BUD
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
  - f. Bendahara Pengeluaran
  
2. Pencatatan yang berkaitan dengan ekuitas meliputi:
  1. Jurnal anggaran;
  2. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. Penutupan transaksi pendapatan dan belanja;
  4. Penutupan Surplus/Defisit-LRA;
  5. Penutupan transaksi pendapatan-LO dan beban;
  6. Penutupan Surplus/Defisit-LO;
  7. Koreksi kesalahan.
  
3. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;

atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah

B. Jurnal Anggaran

1. Dokumen yang digunakan
  - a) DPA
  - b) Bukti memorial
  - c) Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar jurnal
  - a) Pencatatan pada SKPD berdasarkan data anggaran pada DPA
    - (1) Dalam hal estimasi pendapatan lebih besar daripada apropriasi belanja
      - (a) Pembentukan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan	xxx	
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja		xxx

(b) Penutupan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja	xxx	
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
				3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan		xxx

(2) Dalam hal estimasi pendapatan lebih kecil daripada apropriasi belanja

(a) Pembentukan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan	xxx	
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja		xxx

(b) Penutupan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja	xxx	
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx
				3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan		xxx

b) Pencatatan pada SKPKD berdasarkan data anggaran pada DPA

(1) Dalam hal estimasi pendapatan dan estimasi penerimaan pembiayaan lebih besar daripada apropriasi belanja dan apropriasi pengeluaran pembiayaan

(a) Pembentukan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan	xxx	
				3.1.02.02.01.0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx	
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		Xxx
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja		Xxx
				3.1.02.04.01.0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		Xxx

(b) Penutupan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja	xxx	
				3.1.02.04.01.0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
				3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan		Xxx
				3.1.02.02.01.0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		Xxx

- (2) Dalam hal estimasi pendapatan dan estimasi penerimaan pembiayaan lebih kecil daripada apropriasi belanja dan apropriasi pengeluaran pembiayaan

(a) Pembentukan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan	xxx	
				3.1.02.02.01.0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx	
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja		Xxx
				3.1.02.04.01.0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		Xxx

(b) Penutupan

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja	xxx	
				3.1.02.04.01.0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx
				3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan		Xxx
				3.1.02.02.01.0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		Xxx

C. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Sistem akuntansi terkait ekuitas saat transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan memedomani sistem akuntansi pendapatan, belanja dan beban, serta pembiayaan.

D. Penutupan transaksi pendapatan dan belanja

1. Dokumen yang digunakan

- a. Bukti memorial
- b. Dokumen lain yang dipersamakan

2. Standar Jurnal

- a. Pencatatan pada SKPD berdasarkan realisasi pada akun LRA dalam neraca saldo setelah penyesuaian

(1) Surplus

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
4.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Daerah	xxx					
3.1.02.06.0 1.0001	Surplus/Defisit-LRA		xxx				
5.x.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Daerah		xxx				

(2) Defisit

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
4.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Daerah	xxx					
3.1.02.06.0 1.0001	Surplus/Defisit-LRA	xxx					
5.x.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Daerah		xxx				

- b. Pencatatan pada SKPKD berdasarkan realisasi pada akun LRA dalam neraca saldo setelah penyesuaian

(1) Surplus

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
4.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Daerah	xxx					
6.1.xx.xx.x x.xxxx	Penerimaan Pembiayaan Daerah	xxx					
3.1.02.06.0 1.0001	Surplus/Defisit-LRA		xxx				
5.x.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Daerah		xxx				
6.2.xx.xx.x x.xxxx	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		xxx				

(2) Defisit

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
4.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan Daerah	xxx					
6.1.xx.xx.x x.xxxx	Penerimaan Pembiayaan Daerah	xxx					
3.1.02.06.0 1.0001	Surplus/Defisit-LRA	xxx					
5.x.xx.xx.x x.xxxx	Belanja Daerah		xxx				
6.2.xx.xx.x x.xxxx	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		xxx				

E. Penutupan Surplus/Defisit-LRA

1. Dokumen yang digunakan
  - a. Bukti memorial
  - b. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal
  - a. Surplus

Pencatatan berdasarkan nilai surplus-LRA

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.06.0 1.0001	Surplus/Defisit-LRA	xxx					
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx				

b. Defisit

Pencatatan berdasarkan nilai defisit-LRA

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05.0 1.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx					
3.1.02.06.0 1.0001	Surplus/Defisit-LRA		xxx				

F. Penutupan transaksi pendapatan-LO dan beban;

1. Dokumen yang digunakan
  - a. Bukti memorial
  - b. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal

Pencatatan berdasarkan realisasi akun LO dalam neraca saldo setelah penyesuaian

a. Surplus

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
7.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan-LO	xxx					
3.1.01.02.0 1.0001	Surplus/Defisit-LO		xxx				
8.x.xx.xx.x x.xxxx	Beban		xxx				

b. Defisit

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
7.x.xx.xx.x x.xxxx	Pendapatan-LO	xxx					
3.1.01.02.0 1.0001	Surplus/Defisit-LO	xxx					
8.x.xx.xx.x x.xxxx	Beban		xxx				

G. Penutupan Surplus/Defisit-LO;

1. Dokumen yang digunakan
  - a. Bukti memorial
  - b. Dokumen lain yang dipersamakan
2. Standar Jurnal

a. Surplus

Pencatatan berdasarkan nilai surplus-LO

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.01.02.0 1.0001	Surplus/Defisit-LO	xxx					
3.1.01.01.0 1.0001	Ekuitas		xxx				

b. Defisit

Pencatatan berdasarkan nilai defisit-LO

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.01.01.0 1.0001	Ekuitas	xxx					
3.1.01.02.0 1.0001	Surplus/Defisit-LO		xxx				

H. Koreksi kesalahan

Koreksi kesalahan memedomani sistem akuntansi koreksi kesalahan.

BAB XIV  
SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. Umum

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pihak-pihak terkait meliputi:
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran
  - c. PPKD selaku BUD
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
  - e. Fungsi akuntansi SKPKD
  - f. Bendahara Pengeluaran
  - g. Bendahara Penerimaan
  
2. Koreksi kesalahan meliputi:
  1. Koreksi kesalahan yang tidak berulang
    - a. Terjadi pada periode berjalan
    - b. Terjadi pada periode sebelumnya
      - 1) Laporan keuangan belum terbit
      - 2) Laporan keuangan telah terbit
  2. Koreksi kesalahan yang berulang
  
3. PPK SKPD berdasarkan informasi atas transaksi melakukan:
  - a. analisis transaksi;
  - b. pengukuran/penilaian; dan
  - c. pengakuan dan pencatatan dalam bentuk penjurnalan;atas setiap transaksi dengan memanfaatkan dukungan sistem informasi di bidang keuangan daerah

B. Dokumen yang digunakan

1. Bukti memorial
2. Dokumen lain yang dipersamakan

C. Standar Jurnal

1. Koreksi kesalahan yang tidak berulang

a. Terjadi pada periode berjalan

dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan.

b. Terjadi pada periode sebelumnya

1) Laporan keuangan belum terbit

a) Tidak mempengaruhi kas

dilakukan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan

b) Mempengaruhi kas

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan

2) Laporan keuangan telah terbit

a) Tidak mempengaruhi kas

dilakukan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan

b) Mempengaruhi kas

(1) Belanja/beban

(a) kelebihan belanja/beban

dilakukan pencatatan melalui penambahan pendapatan dari pengembalian terhadap kelebihan belanja dan pendapatan dari pengembalian-LO terhadap kelebihan beban dengan memedomani standar akuntansi pendapatan.

(b) kekurangan belanja/beban

dilakukan melalui pengurangan kas dan saldo anggaran lebih

i. Pencatatan pada SKPD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx		3.x.xx.xx.x x.xxxx	Ekuitas	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

ii. Pencatatan pada SKPKD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx		3.x.xx.xx.x x.xxxx	Ekuitas	xxx	

3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

(2) perolehan aset selain kas

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan

(a) Menambah kas dan mengurangi aset tetap

i. Pencatatan pada SKPD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		xxx	1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx

ii. Pencatatan pada SKPKD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		xxx	1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap		xxx
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

(b) Mengurangi kas dan menambah aset tetap

i. Pencatatan pada SKPD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx		1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	1.1.01.03. 01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

ii. Pencatatan pada SKPKD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx		1.3.xx.xx.x x.xxxx	Aset Tetap	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

(3) pendapatan-LRA/pendapatan-LO

(a) kelebihan pendapatan-LRA/pendapatan-LO

memedomani standar akuntansi pendapatan.

(b) kekurangan pendapatan-LRA/pendapatan-LO

i. Pencatatan pada SKPD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.02. 01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		xxx	3.x.xx.xx.x x.xxxx	Ekuitas		xxx

ii. Pencatatan pada SKPKD

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				3.x.xx.xx.x x.xxxx	Ekuitas		xxx

(4) penerimaan pembiayaan

dilakukan pembetulan pada kas, saldo anggaran lebih, dan akun aset terkait

(a) menambah kas

Contoh:

Penerimaan setoran atas kekurangan pembayaran  
angsuran pokok pinjaman tahun lalu

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				1.2.02.02. xx.xxxx	Investasi- Pemberian Pinjaman Daerah		xxx

(b) Mengurangi kas

Contoh:

Pengembalian terhadap kelebihan pembayaran angsuran  
pokok pinjaman tahun lalu

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx		1.2.02.02. xx.xxxx	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

(5) pengeluaran pembiayaan

dilakukan pembedaan pada kas, saldo anggaran lebih, dan  
akun kewajiban terkait

(a) menambah kas

contoh:

Penerimaan kelebihan setoran pembayaran angsuran  
utang jangka panjang tahun lalu

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx
				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				2.2.xx.xx.x x.xxxx	Kewajiban Jangka Panjang		xxx

(b) mengurangi kas

contoh:

Pembayaran angsuran utang jangka panjang yang belum tercatat

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx		2.2.xx.xx.x x.xxxx	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

(6) kewajiban

dilakukan pembetulan pada kas dan kewajiban bersangkutan

(a) menambah kas

contoh:

penerimaan kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL	xxx		1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah	xxx	
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		xxx	1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD		xxx

				3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD	xxx	
				2.2.xx.xx.x x.xxxx	Kewajiban Jangka Panjang		xxx

(b) mengurangi kas

contoh:

pembayaran kekurangan angsuran utang jangka panjang

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit	KodeRek.	Uraian	Debet	Kredit
6.1.01.xx. xx.xxxx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx		2.2.xx.xx.x x.xxxx	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
3.1.02.05. 01.0001	Estimasi Perubahan SAL		xxx	3.1.03.01. 01.0001	RK PPKD		xxx
				1.1.13.01. 01.0001	RK SKPD	xxx	
				1.1.01.01. 01.0001	Kas di Kas Daerah		xxx

## 2. Koreksi kesalahan yang berulang

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Contoh:

Koreksi kesalahan pada penerimaan pajak dan retribusi yakni dalam hal kelebihan penerimaan maupun kekurangan penerimaan.

Pencatatan dilakukan pada saat:

- a. terjadi pengeluaran kas dalam hal pengembalian kelebihan pendapatan dengan mengurangi kas dan pendapatan
- b. terjadi penerimaan kas dalam hal penerimaan kekurangan pendapatan dengan menambah kas dan pendapatan.

Penjurnalan memedomani standar akuntansi pendapatan.

BAB XV  
SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

A. Umum

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan SKPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan.

B. Pihak terkait

1. Bendahara Umum Daerah
2. Fungsi akuntansi SKPKD
3. PPKD
4. PPK-SKPD

C. Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Penjurnalan

Transaksi berdasarkan dokumen yang sah dicatat dalam bentuk jurnal.

2. Pembuatan Buku Jurnal

Transaksi yang telah dilakukan penjurnalan, dicatat dalam buku jurnal.

Ilustrasi

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen Sumber	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

3. Pembuatan Buku Besar

Pencatatan transaksi melalui jurnal selanjutnya diposting ke dalam buku besar. Setiap akun dan jumlahnya diatribusikan ke masing-masing akun buku besar.

Ilustrasi

Tanggal	Uraian	Ref	Nomor Bukti/Dokumen Sumber	Debit	Kredit	Saldo

4. Neraca Saldo

Sebelum penyusunan laporan keuangan, dilakukan penyusunan neraca saldo.

Ilustrasi

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
		Debit	Kredit

5. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

a. Menyiapkan kertas kerja

Fungsi akuntansi SKPD menyiapkan kertas kerja sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

1) Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian

Neraca saldo sebelum penyesuaian berasal dari rekapitulasi saldo pada Buku Besar yang dicantumkan dalam kertas kerja kolom neraca saldo sesuai dengan posisi baik debit maupun kredit.

2) Membuat jurnal penyesuaian

Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun tertentu dan pengakuan atas transaksi yang bersifat akrual antara lain koreksi kesalahan, penjurnalan yang belum dilakukan, penyusutan, dan/atau penyisihan piutang. Jurnal penyesuaian dicantumkan pada kolom penyesuaian pada kertas kerja.

3) Membuat neraca saldo setelah penyesuaian

Berdasarkan selisih antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan penyesuaian, nilai dicantumkan pada neraca saldo setelah penyesuaian.

Ilustrasi

Kode Akun	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit

b. Menyusun Laporan Keuangan SKPD

1) Laporan Realisasi Anggaran

Tahapan penyusunan LRA:

a) LRA disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah penyesuaian.

Fungsi Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran SKPD dan kemudian disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD. Selanjutnya, nilai kolom debit dan kredit dijumlahkan, kemudian selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai surplus/defisit LRA. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

- b) Pembuatan jurnal penutup LRA untuk membuat nilai akun-akun LRA menjadi nol. Standar jurnal memedomani standar akuntansi ekuitas.
- c) Pembuatan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

## 2) Laporan Operasional

Tahapan penyusunan LO:

- a) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional SKPD.
- b) Pembuatan jurnal penutup LO untuk membuat nilai akun-akun LO menjadi nol. Standar jurnal memedomani standar akuntansi ekuitas.
- c) Pembuatan Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

## 3) Neraca

Tahapan penyusunan neraca

- a) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi SKPD menyusun Neraca.
- b) Pembuatan jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit-LO ke akun Ekuitas. Standar jurnal memedomani standar akuntansi ekuitas.
- c) Pembuatan Neraca saldo akhir yang akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

## 4) Laporan Perubahan Ekuitas

Fungsi Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

## 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### D. Tahapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### 1. Penyusunan kertas kerja konsolidasi

- a. Fungsi akuntansi SKPKD menyiapkan kertas kerja sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

##### 1) Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian

Neraca saldo sebelum penyesuaian berasal dari rekapitulasi saldo pada Buku Besar yang dicantumkan dalam kertas kerja kolom neraca saldo sesuai dengan posisi baik debit maupun kredit.

2) Membuat jurnal penyesuaian

Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun tertentu dan pengakuan atas transaksi yang bersifat akrual antara lain koreksi kesalahan, penjurnalan yang belum dilakukan, penyusutan, dan/atau penyesuaian piutang. Jurnal penyesuaian dicantumkan pada kolom penyesuaian pada kertas kerja.

3) Membuat neraca saldo setelah penyesuaian

Berdasarkan selisih antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan penyesuaian, nilai dicantumkan pada neraca saldo setelah penyesuaian.

Ilustrasi

Kode Akun	Uraian	Neraca Saldo SKPD A		Neraca Saldo SKPD B		Neraca Saldo SKPD C		Jurnal Eliminasi		Neraca Saldo Pemda	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit

b. Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
	Tidak ada pencatatan			3.1.03.01 1.01.00	RK PPKD	xxx	
				1.1.13.01 1.01.00	RK SKPD		xxx

c. Neraca Saldo Pemerintah Daerah

Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah berdasarkan selisih Neraca Saldo SKPD dan Jurnal Eliminasi.

2. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi

a. Laporan Realisasi Anggaran

Tahapan penyusunan LRA:

1) LRA disusun berdasarkan Neraca Saldo setelah penyesuaian.

Fungsi Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Selanjutnya, nilai kolom debit dan kredit dijumlahkan, kemudian selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai surplus/defisit LRA. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

- 2) Pembuatan jurnal penutup LRA untuk membuat nilai akun-akun LRA menjadi nol. Standar jurnal memedomani standar akuntansi ekuitas.
  - 3) Pembuatan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA Menyusun LO,
- b. Laporan Operasional
- Tahapan penyusunan LO:
- 1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.
  - 2) Pembuatan jurnal penutup LO untuk membuat nilai akun-akun LO menjadi nol. Standar jurnal memedomani standar akuntansi ekuitas.
  - 3) Pembuatan Neraca Saldo setelah Penutupan LO
- c. Neraca
- Tahapan penyusunan neraca:
- 1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi SKPKD menyusun Neraca.
  - 2) Pembuatan jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit-LO ke akun Ekuitas. Standar jurnal memedomani standar akuntansi ekuitas.
  - a) Pembuatan Neraca saldo akhir yang akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya akuntansi yang selanjutnya.
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, Fungsi Akuntansi SKPKD menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- Fungsi Akuntansi SKPKD menyusun Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya.
- f. Laporan Arus Kas
- Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah dengan unsur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

---